

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, banyak permasalahan terkait pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Misalnya perusahaan yang tidak mampu mengolah maupun membuang limbahnya dengan tepat, seperti kasus perusahaan PT. Toba Pulp Lestari yang membuat warga sekitar was-was karena adanya pencemaran lingkungan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terjadi penimbunan limbah antara lain, dregs b412, Grifs Lumpur kapur (Lie Mud) jenis B351/1 dan limbah dasar (Bottom ash). Selain dampak buruk terhadap lingkungan, PT. Toba Pulp Lestari juga terlibat konflik lahan dengan warga sekitar. Hal ini membuat warga mendesak pemerintah untuk mencabut ijin perusahaan tersebut (medan.tribunnews.com). Kemudian beberapa perusahaan lainnya juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah ketenagakerjaan yang sempat menjadi *headline* di berita nasional seperti PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, PT. Newmont Minahasa Raya di Sulawesi, dan PT. Freeport di Irian Jaya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut semakin membuka mata Indonesia tentang bagaimana pentingnya pengungkapan pertanggungjawaban perusahaan.

Peran pemerintah sebagai penegak hukum telah mengatur pengungkapan tanggung jawab perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 74 yang menyebutkan ayat 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (www.ojk.go.id). Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tanggungjawab perusahaan, tidak menutup kemungkinan perusahaan dalam melakukan pengungkapannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan perlu dipertimbangkan, jika perusahaan ingin mempertahankan keberlangsungan perusahaan (*going concern*) dalam jangka panjang, kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Untuk memudahkan tercapainya pembangunan keberlanjutan, maka perusahaan tidak lagi berpijak pada konsep *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi ekonomi (*financial/profit*) saja, melainkan harus berpijak pada konsep *triple bottom lines* yang telah mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan yang seharusnya yaitu *profit (economic)*, *people (social)*, dan *planet (environment)*

(Gobel *et al.*, 2017). Hal ini dikarenakan kegiatan maupun tindakan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak secara langsung terhadap laba perusahaan, manusia baik individu maupun masyarakat luas, dan lingkungan serta kehidupan yang ada di sekitarnya.

Pengungkapan aktifitas tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadikan perusahaan dinilai memiliki etika yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sari dan Nuzula (2019) mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dipandang sebagai bentuk kontribusi perusahaan baik kepada pihak internal maupun eksternal terkait kelangsungan hidup perusahaan. Adanya pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial, agar perusahaan dapat meningkatkan reputasinya serta diterima oleh pihak eksternal atas keterbukaan informasi yang disampaikan.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mencerminkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Namun, dengan tingginya profitabilitas maka pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih tinggi. Maka dari itu perusahaan akan melakukan penghematan pajak salah satunya seperti *tax avoidance*. Dalam hal ini, perusahaan akan punya cara masing-masing untuk melakukan *tax avoidance*. Nugroho dan Yulianto (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Mustanda (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rohana dan Ayem (2019) menunjukkan hal yang sama, yakni profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya penelitian Anggita *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas yang lebih banyak. Sholihin dan Aulia (2018) menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani dan Suardana (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh positif pada *enviromental disclosure*. Berbeda dengan Pradnyani dan Sisdyani (2015) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan.

Adanya ke tidak konsistenan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini penulis ingin menguji kembali ukuran perusahaan dan profitabilitas serta *tax avoidance* dalam mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2018. Sektor industri dasar dan kimia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% *year-to-date* (ytd) pada tahun 2017. Hal tersebut menjadikan sektor ini sebagai sektor yang pertumbuhannya paling tinggi kedua setelah sektor keuangan yang mencatatkan pertumbuhan hingga 29,18% ytd (www.cnnindonesia.com). Maka dari itu peneliti ingin mengetahui seberapa luas pengungkapan CSR pada tahun selanjutnya sebagai salah satu bentuk

dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Limbah yang berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan juga menjadi alasan penulis untuk meneliti pengungkapan CSR pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *tax avoidance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *tax avoidance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan menambah literatur akuntansi mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

b. Manfaat Praktis:

1. Perusahaan

Secara empiris penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan

pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan, sehubungan dengan pelaporan dan pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia khususnya sektor industri dasar dan kimia.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai dasar informasi tambahan dalam penelitian lebih lanjut dibidang yang sama di waktu yang akan datang.

